

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan mengalami redefinisi, yang pada era sebelum 1970-an pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja yang sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan suatu negara hanya diukur dengan berdasarkan tingkat pertumbuhan *Gross National Income* (GNI) yang diyakini dapat menetes ke bawah (*trickle down effect*) dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya. Setelah era 1970 definisi pembangunan pembangunan ekonomi mengalami redefinisi penghapusan atau pengurangan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja yang berdasarkan distribusi ulang hasil pembangunan yang lebih merata. (Todaro dan Smith, 2006: 20).

Menurut Profesor Dudley Seer dalam Todaro dan Smith, 2006: 20-21) jika tidak ada perbaikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan penduduk, tingkat pengangguran dan tidak ada perubahan penanggulangan masalah ketimpangan pendapatan maka negara tersebut dapat dikatakan belum mengalami proses pembangunan positif walaupun pendapatan per kapitanya mengalami peningkatan positif hingga dua kali lipat.

Pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang bertujuan antara lain tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang membangun termasuk Indonesia adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketidakmampuan mekanisme pasar dalam teori ekonomi klasik dalam menjawab persoalan ekonomi merupakan titik awal perkembangan pemikiran Keynes.

Masalah utama perekonomian adalah pengangguran yang besar menjadi alasan kuat perlunya campur tangan pemerintah (kebijakan) yang merupakan karakter pemikiran Keynes. Perubahan pemikiran dari aliran klasik yang mengedepankan mekanisme pasar dengan dimotori oleh Adam Smith (1776) mulai kehilangan perannya berganti dengan pemikiran baru yang dimotori oleh John Maynard Keynes dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) yang direspons oleh masyarakat saat itu termasuk Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon sehingga mewarnai kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Ajaran Keynes menekankan pentingnya perhatian permintaan agregat masyarakat dan kebijakan yang lebih aktif dari pemerintah. Keynes menolak

gagasan klasik yang menyatakan bahwa sistem kapitalis akan menyesuaikan sendiri dalam jangka panjang, kapitalisme tidak stabil yang menyebabkan ekonomi yang stagnan secara terus menerus pada tingkat ekuilibrium pengangguran, tergantung pada level ketidakpastian dalam sistem finansial yang rapuh (Skousen, 2009: 416). Keynes menawarkan adanya jalan tengah antara perencanaan terpusat dengan mekanisme pasar. Perencanaan pembangunan diperlukan karena adanya kegagalan mekanisme pasar, ketidakpastiannya yang akan datang dan memberikan arah pembangunan yang jelas (Kuncoro, 2012: 4).

Pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan fungsi investasi yang memungkinkan suatu masyarakat terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja (Sukimo, 2000: 367). Model pertumbuhan WW. Rostow (1960) menekankan bahwa negara hanya dapat mencapai tahapan tinggal landas menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan yang digerakkan pembaharuan-pembaharuan (*innovations*) dan peningkatan penanaman modal (investasi) sehingga tingkat pertambahan pendapatan nasional lebih tinggi daripada tingkat pertambahan penduduk (Sukimo, 1985: 107). Pada perekonomian yang mengakui mekanisme transmisi tingkat bunga, besaran suku bunga harus terpantau oleh pemerintah sehingga sesuai dengan daya jangkau sektor riil.

Pangkal masalah pengangguran dapat terpecahkan dengan mengadakan investasi penyerap tenaga kerja karena adanya hubungan positif antara investasi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong konsumsi menjadi normal (Sagir, 2009: 28-29). Salah satu alat kebijakan ekonomi adalah *easy money policy* yang diharapkan dapat menciptakan kemudahan memperoleh kredit perbankan untuk investasi. Terjadinya peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan barang - barang investasi dan barang-barang konsumsi sehingga dapat meningkatkan kecenderungan kenaikan harga-harga umum (inflasi).

Untuk menekan inflasi dilakukan kebijakan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) yang ditandai dengan meningkatnya suku bunga perbankan yang cukup tinggi dan berakibat lemahnya pertumbuhan ekonomi dan lemahnya laju penciptaan lapangan kerja. Ricardo (1817) dalam Adisasmita (2013:49) menjelaskan bahwa pemupukan modal bergantung pada kemampuan untuk menabung dan kemauan untuk menabung. Modal dapat dinaikkan dengan cara menaikkan produksi dan mengurangi konsumsi. Pendapat ini merupakan mekanisme pembentukan modal swasta yang merupakan sumber investasi swasta sedangkan sumber pemupukan modal yang ada ditangani pemerintah sebagai sumber investasi pemerintah berasal dari pajak. Pengenaan pajak bagi para kapitalis, pemilik tanah merupakan upaya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan melalui investasi pemerintah.

Tidak dapat diragukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang memang sangat penting bagi penghapusan/pengurangan tingkat kemiskinan. Hipotesis Kuznet pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan saat mendekati akhir pembangunan jumlah orang miskin akan berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lainnya yang mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan seperti struktur ekonomi, pola distribusi pendapatan, ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, tingkat investasi, dan keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Tambunan, 2008: 172).

Otonomi daerah sebagai salah satu solusi mendidik daerah menjadi lebih mandiri dalam berekonomi yang pada akhirnya mampu mengembangkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional Sejak tahun 1999 pada saat UU Nomor 22 tahun 1999 digulirkan tentang otonomi daerah, sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sebuah perubahan mendasar bagi tatanan pemerintahan pusat dan daerah, yaitu kewenangan daerah yang besar dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan.

Selanjutnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang menjelaskan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari dana bagi hasil terdiri pajak dan sumber daya alam dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu terjaminnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan terjangkau secara luas serta peningkatan daya saing. Pembangunan daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antar wilayah yang timpang seperti yang terjadi pada yang telah lalu (Carson, 2002: 47-78).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi namun tidak banyak mengalami perubahan dalam struktur ekonomi yang dibagi dalam tiga sektor utama PDRB yaitu Sektor Pertanian, Sektor Industri (Pertambangan, Industri Pengolahan, Listrik, Gas & Air dan Konstruksi), dan Sektor Jasa (Perdagangan, Hotel & Restoran, Transportasi & Komunikasi, Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa). Kontribusi yang semakin mengecil adalah sektor pertanian. Pergeseran struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan tergambar pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1.
Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan
Periode 2011-2015

Tahun	Sektor (%)			Total (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Pertanian	Industri	Jasa		
2011	23,40	39,47	37,07	100	6,49
2012	22,57	39,87	37,57	100	5,85
2013	22,60	39,90	37,60	100	5,53
2014	22,62	39,92	37,70	100	5,07
2015	22,65	39,93	37,75	100	4,49

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah), 2016

Perhitungan PDRB melalui pendekatan produksi tidak terlepas dari peranan tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya. Kontribusi Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami pergeseran proporsi penyerapan tenaga kerja yaitu pada tahun 2011 masih didominasi sektor Pertanian, namun pada tahun 2015 walaupun masih didominasi oleh sektor pertanian namun sektor industri meningkat cukup tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik itu diharapkan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan keadaan angkatan kerja Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin meningkat diperlukan adanya pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja yang optimal.

Pemerintah daerah selain dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat juga memiliki pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan sumber PAD agar meningkat kemampuan keuangan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak otonomi daerah tahun 2000 terus mengalami peningkatan, demikian pula dana perimbangan juga mengalami peningkatan sehingga APBD Provinsi Kalimantan Selatan juga meningkat.

Tabel 1.2.
Perbandingan PAD dengan Dana Transfer Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Total APBD (Rp)
2011	1.913.087.350.951	1.195.565.014.393	3.108.652.365.344
2012	1.803.998.515.560	1.803.998.515.560	3.108.943.628.560
2013	2.502.279.216.720	1.505.123.319.820	4.007.402.536.540
2014	2.898.704.954.950	1.531.320.000.520	4.430.024.955.470
2015	3.001.297.216.830	1.474.714.660.000	4.476.011.876.830

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

PAD pemerintah tergambar dari besarnya APBD Provinsi Kalimantan Selatan hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2, Peningkatan PAD dan Dana Transfer memperbesar APBD yang menonjol sejak tahun 2011 karena PAD mencapai angka Rp 1.913.087.350.951,- dan Dana Transfer mencapai Rp 1.195.565.014.393,- sehingga total APBD menjadi sebesar 3.108.652.365.344,- Total APBD juga mengalami peningkatan sejak tahun 2011 sebesar Rp 3.108.652.365.344,- dan APBD tahun 2015 yang besarnya mencapai Rp 4.476.011.876.830,-

Tabel 1.3
Investasi Pemerintah dari Belanja Investasi Kab/Kota
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (dalam Jutaan)

Kab/Kota	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Tanah Laut	324.300	349.058	360.085	370.722	390.810
Kotabaru	318.816	339.023	350.620	365.622	375.211
Banjar	152.070	232.702	242.711	251.614	263.710
Banto Kuala	273.034	287.390	295.710	301.213	305.620
Tapin	175.159	245.400	255.200	268.730	280.721
Hulu Sungai Selatan	292.936	313.597	339.329	345.298	355.600
Hulu Sungai Tengah	286.625	307.115	320.831	328.710	335.830
Hulu Sungai Utara	129.257	160.866	175.722	183.980	190.820
Tabalong	327.626	353.169	360.730	365.710	372.650
Tanah Bumbu	249.611	269.339	275.821	280.645	286.730
Balangan	524.808	611.427	620.713	645.820	652.720
Banjarmasin	883.219	966.998	985.820	1.005.100	1.025.210
Banjarmasin	479.178	352.413	360.271	365.820	367.812
Total	4.756.380	5.156.843	5.323.837	5.469.675	5.603.709

Sumber: APBD Kab/Kota se Kalimantan Selatan, 2016 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa investasi pemerintah kabupaten/kota meningkat secara dalam tiap tahunnya, namun yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2011 sebesar Rp 249.611 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 286.730 juta dan Kabupaten Balangan meningkat dari Rp 524.808 juta menjadi Rp 652.720 juta. Peningkatan kedua daerah ini peningkatan dan besarnya melebihi dari kabupaten induknya masing-masing yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Kotabaru.

Peningkatan yang terjadi pada investasi baik investasi pemerintah maupun investasi swasta akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan menurunnya tingkat kemiskinan sehingga dalam studi ini akan menguji, membuktikan dan menganalisis semua itu. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan ekonomi menurut Smith dalam Sukirno (2006:245) yang menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan nasional dan perkembangan penduduk akan memperluas pasar dan penciptaan tabungan yang digunakan untuk investasi.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar mencakup sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perikanan laut, serta sektor pertambangan batu bara yang menarik kegiatan investasi baik berasal dari domestik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2002 menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah yang diikuti kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja (Kuncoro, 2009: 238).

Tabel 1.4.

Realisasi Investasi Swasta di Kalimantan Selatan Periode 2011 - 2015
(Dalam Jutaan)

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total Investasi (Rp)
2011	783.114,1	130.194.743	130.977.857,1
2012	862.438,6	407.592.156	408.454.594,6
2013	902.280,2	620.500.200	621.402.480,2
2014	1.010.820,3	743.664.300	744.675.120,3
2015	1.070.240,7	820.764.210	821.834.450,7

Sumber : DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Berdasarkan parameter survei KPPOD maka kondisi iklim investasi Provinsi Kalimantan Selatan relatif cukup kondusif sehingga realisasi investasi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Secara lebih rinci hal di atas dapat dilihat dari Tabel 1.4.

Salah satu indikator kinerja investasi yang dapat dilihat adalah pencapaian nilai realisasi investasi terhadap perencanaan. Realisasi investasi meningkat pada tahun 2011 sebesar Rp. 130.977.857,1 juta dan pada tahun 2015 realisasi investasi menjadi Rp. 821.834.450,7 juta.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam mengembangkan investasi khususnya dengan fasilitas PMDN dan PMA ini adalah untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif diperlukan karena berarti telah menggerakkan roda perekonomian lebih cepat. Pergerakan itu membawa peningkatan produksi atau nilai tambah dan produktivitas di berbagai rantai ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.5
Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005 S/D 2015

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-rata Laju Pertumbuhan 2005-2015 (%)
	2005 (Orang)	2010 (Orang)	2015 (Orang)	
Tanah Laut	254.301	278.929	325.283	1,72
Kotabaru	261.792	285.634	320.208	1,90
Banjar	457.242	507.095	554.443	1,72
Barito Kuala	263.732	277.882	298.282	1,48
Tapin	147.638	154.890	181.778	1,52
Hulu Sungai Selatan	200.956	210.693	227.153	1,28
Hulu Sungai Tengah	233.394	247.972	260.292	1,29
Hulu Sungai Utara	207.663	219.970	225.386	1,44
Tabalong	184.373	197.094	239.593	1,75
Tanah Bumbu	210.717	236.078	325.115	3,82
Balangan	98.377	103.058	123.449	1,82
Banjarmasin	574.325	650.533	675.440	1,46
Banjarbaru	145.590	175.272	234.371	3,10
Kalimantan Selatan	3.240.100	3.545.100	3.989.793	1,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 1.5 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan menurut sensus tahun 2015 mencapai 3.989.793 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,84% per tahun. Penduduk terbesar Kota Banjarmasin mencapai 675.440 orang dan terkecil Kabupaten Balangan sebesar 123.449 orang dengan pertumbuhan terendah 1,82% dan Kabupaten Tapin yang hanya 181.778 orang dan laju pertumbuhan 1,52%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tanah

Bumbu sebesar 3,82% dan Banjarbaru sebesar 3,10%. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan daerah pemekaran dan di pesisir pantai dan Kota Banjarbaru karena daerah ini merupakan daerah transit dan pintu gerbang masuknya penduduk dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya perkembangan sektor perumahan juga mempengaruhi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk kota ini.

Gambaran yang lebih rinci tentang jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Persentase
2011	198.611	5,35
2012	189.875	5,06
2013	183.903	4,77
2014	189.435	4,82
2015	198.450	4,97

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun 2011 sebesar 5,35% turun menjadi hanya 4,97 % pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya investasi yang realisasi pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada berbagai sektor ekonomi. Investasi pemerintah dan investasi swasta yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan dari tahun 2011 sebesar 198.611 orang menjadi hanya 198.450 orang. Investasi mendorong munculnya berbagai usaha yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan daya beli yang dapat meningkatkan konsumsi dan produksi.

Perkembangan penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan tahun 2011 s/d 2015 terus menerus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sebesar 198.450 orang jauh sekali menurun dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 198.611 orang. Menurunnya tingkat kemiskinan ini merupakan hasil proses pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang atau kelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Terjadinya penurunan persentase tingkat kemiskinan pada tahun 2015 terlihat sebesar 4,97%, lebih rendah dibanding tahun 2011 sebesar 5,35%. Jadi dalam lima tahun terakhir ini persentase penduduk

miskin menunjukkan perkembangan yang menurun. (Bappeda Provinsi Kalsel, 2016).

Tabel 1.7.
Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2010-2015 (orang)

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Tanah Laut	14.698	14.000	13.654	14.039	14.790
Kotabaru	14.698	14.600	14.656	15.050	14.720
Banjar	16438	15.500	15.287	15.719	18.050
Barito Kuala	15.278	14.600	14.909	15.318	15.960
Tapin	9.089	8.700	6.045	6.518	7.010
Hulu Sungai Selatan	13.107	15.100	14.836	15.233	14.590
Hulu Sungai Tengah	14.891	14.200	14.181	14.557	15.080
Hulu Sungai Utara	15.664	15.000	15.228	15.623	15.940
Tabalong	13.924	13.200	14.305	14.709	15.710
Tanah Bumbu	16.900	16.100	16.039	16.563	17.910
Balangan	8.412	8.000	7.383	7.664	7.280
Banjarmasin	30.555	29.100	27.777	28.537	29.950
Banjarbaru	11.603	11.100	9.997	9.965	11.460

Sumber : BPS Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Sebaran penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 pada Tabel 1.7 cukup merata dan menurun dibandingkan tahun 2011, hanya yang menonjol cukup besar pada Kota Banjarmasin 29.950 orang dan Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 17.910 orang, dan yang terkecil pada Kabupaten Balangan hanya 7.280 orang dan Kabupaten Tapin 7.010 orang.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin perlu diteliti lebih dalam apakah ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang juga terjadi peningkatan dan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada di bawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah, yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya.

Atas dasar kebutuhan minimal yang harus dicukupi untuk hidup maka di tentukan biaya garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan

jumlah dan persentase penduduk miskin. Garis kemiskinan untuk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perhitungan BPS tahun 2010 adalah sebesar Rp.210.850,00/kapita. Sementara, menurut BKKBN, keluarga miskin dikelompokkan dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I karena alasan ekonomi belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimum.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong industrialisasi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya serta dapat memperbaiki pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian empiris yang berkaitan dengan pengaruh variabel ekonomi makro seperti investasi (Badrudin, 2011: 39-66, Warsilan, 2013), pendapatan asli daerah, transfer pemerintah (Warsilan, 2013), ekspor, inflasi, perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan (Siswantoro dan Mulyanti, 2012). Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut maka perlu dikaji dan dilakukan studi untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis adanya perbedaan teori dan praktek artinya investasi pemerintah dan investasi swasta berperan cukup besar dalam mendorong perekonomian daerah. Jadi investasi yang secara teori dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan ternyata dalam praktek belum mampu berdasarkan fakta yang terjadi.

Selanjutnya terjadi pembagian kerja dan spesialisasi yang mendorong inovasi produk dan proses yang meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin pemerintah dapat menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya maka di situlah terjadi pertumbuhan ekonomi menurut definisi Kuznet dalam Djojohadikusumo, 1994, 53. Dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan tentunya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan antar wilayah (*regional disparity*). Basri (1995:92) menyatakan bahwa ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu : (1) kesenjangan antar daerah, (2) kesenjangan antar sektor, dan (3) kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Kesenjangan antar daerah dapat terlihat dari antara wilayah yang maju dan wilayah yang kurang maju, hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut lebih besar atau lebih kecil tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Fenomena penelitian di atas dapat dideskripsikan melalui Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Gambaran Fenomena Penelitian

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa total investasi pemerintah dan investasi swasta pada seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2011-2015, selalu meningkat di setiap tahunnya. Peningkatan nilai investasi pemerintah dan investasi swasta ternyata tidak searah dengan angka pertumbuhan ekonomi yang justru cenderung menurun, begitu juga tingkat kemiskinan yang cenderung meningkat di tahun 2013-2015, walaupun sebelumnya ada penurunan, hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar ternyata secara umum, meningkatnya investasi pemerintah dan investasi swasta tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak mampu menekan angka kemiskinan. Selain itu, angka penyerapan tenaga kerja relatif stagnan, bahkan turun menjadi 48,22% di tahun 2015, angka terendah selama periode 2011-2015.

Fenomena tidak konsistennya pertumbuhan investasi pemerintah dan investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi kondisi disparitas pendapatan di setiap kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan. Ada dugaan bahwa ketidakkonsistenan antara pertumbuhan investasi pemerintah dan investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta tingkat kemiskinan, terjadi pada wilayah dengan disparitas pendapatan yang tinggi, sehingga pertumbuhan investasi

pemerintah dan investasi swasta tidak diikuti dengan naiknya pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta menurunnya tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, maka diperlukan studi mendalam dan komprehensif terhadap keterkaitan variabel penelitian. Hal inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian untuk menguji, membuktikan dan menjelaskan tentang pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, disparitas pendapatan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Keterkaitan antar variabel digambarkan berdasarkan hipotesis yang diajukan dengan memperhatikan teori maupun penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang menunjukkan Investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disampaikan oleh Rachim (2005), Suindyah (2009), Hamzah (2007), Bahrudin (2011) dan Saraswati dan Ramantha (2018), sementara hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Siswantoro dan Mulyanti (2012), Parasan *et al.* (2016) Agustini dan Kurniasih (2017) yaitu Investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja didukung oleh Rachim (2005), Fitriadi (2008), Suindyah (2009), dan Kamar (2017), sementara penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Kurniasih (2017), Nurhayati (2018) memberikan hasil yang berlawanan.

Hasil penelitian yang menunjukkan Investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Parasan *et al.* (2016), Agustini dan Kurniasih (2017), Saraswati dan Ramantha (2018), dan pengaruh Investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja didukung oleh Amelia (2014), Romdhoni (2017), dan Kamar (2017)

Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dilakukan oleh Fitriadi (2008), Ardiansyah *et al.* (2018), Putra dan Yasa (2018), dan hasil penelitian yang diperoleh Kamar (2017) ada pengaruh tapi dengan arah negatif. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan didukung oleh Suharto (2011) dan Bahrudin (2011), sedangkan hasil penelitian Putra dan Yasa (2018) memberikan hasil sebaliknya yaitu Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan sebagian sudah pernah dilakukan. Penelitian mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Todaro (2000) yang menyatakan investasi merupakan salah satu faktor komponen utama pertumbuhan ekonomi. Mursinto (2004) dalam penelitian

sebelumnya juga menyimpulkan investasi pemerintah daerah dan investasi swasta keduanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil penelitian Kuznet dalam Pressman (2000) yang menunjukkan investasi swasta dampaknya tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai bagi hasil dan royalti yang nilainya sangat kecil. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, khususnya mengenai pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja ditunjukkan oleh Wurarah (2011) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja, Halim (2008) dalam penelitiannya juga menunjukkan investasi pemerintah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hasil ini berbeda dengan pernyataan Mangkosoebroto (2001) bahwa investasi pemerintah merupakan investasi padat modal infrastruktur, sehingga tidak banyak membutuhkan tenaga kerja, India (2012) dalam penelitiannya memperkuat realita tersebut bahwa investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja karena banyak digunakan untuk penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana transportasi. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan inkonsistensi, yang menunjukkan adanya *gap* mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja juga masih terjadi inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Teori Lewis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi khususnya pada negara-negara berkembang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat investasi di sektor industri juga tinggi, sehingga menimbulkan perluasan *output* lapangan kerja. Pernyataan ini ternyata bertolak belakang dengan hasil penelitian Todaro (2000) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, karena reinvestasi yang dilakukan oleh negara berkembang justru untuk mengembangkan sektor industri yang tidak padat tenaga kerja. Fei dan Ranis dalam Jhingan (2003) juga menyatakan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya *gap* mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel disparitas pendapatan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat

kemiskinan, pada penelitian sebelumnya belum pernah diteliti mengenai moderasi disparitas pendapatan, yang ada adalah disparitas pendapatan sebagai variabel independen. Masalah disparitas pendapatan merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan ekonominya, karena tidak sedikit negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, karena memang adanya disparitas yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi sering kali gagal untuk mengurangi kemiskinan, kondisi ini diperjelas dengan fenomena pada penelitian ini yang secara umum diketahui meningkatnya investasi pemerintah dan investasi swasta tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta tidak mampu menekan angka kemiskinan, yang hal tersebut disebabkan tidak membedakan wilayah-wilayah dengan disparitas pendapatan yang rendah dan wilayah dengan disparitas yang tinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
3. Apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
4. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi dengan meratanya disparitas pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
7. Apakah penyerapan tenaga kerja dengan meratanya disparitas pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pengaruh investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan disparitas pendapatan sebagai moderasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pengaruh penyerapan tenaga kerja dengan disparitas pendapatan sebagai moderasi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi akademisi dalam bidang teori ekonomi makro khususnya yang berkaitan dengan indikator ekonomi makro sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi khususnya bagi pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam menetapkan kebijakan guna meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja serta menurunkan kemiskinan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain yang berminat dalam mengembangkan teori ekonomi makro, khususnya berkaitan dengan tema dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan.

